

STRATEGI EFEKTIF OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA PUBLIK

Yuyun Samburoto^{1*}, Cendy Rahmawati², Liyanti³, Sarnia Wabula⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Miuhammadiyah Buton-

¹Yuyunsamburoto02@gmail.com, ²cendyrahma@gmail.com, ³azwaliyanti@gmail.com,

⁴nias89454@gmail.com

*Penulis Koresponden

diajukan: 23 Mei 2024,

diterima: 23 Juni 2024.

Abstrak

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, optimalisasi penggunaan dana publik adalah masalah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam mengoptimalkan penggunaan dana publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis artikel-artikel terkait penggunaan dana publik. Sumber data yang digunakan adalah artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian melalui website *Google Scholar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi yang efektif untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik. Selain itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan serta mempublikasikan informasi keuangan secara berkala. Dengan menyebarkan informasi keuangan secara teratur, dalam proses perencanaan anggaran serta meningkatkan pengawasan oleh lembaga terkait. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta dengan memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan saran tentang bagaimana penggunaan dana publik digunakan. Penelitian ini menyarankan penerapan strategi-strategi ini secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai optimalisasi penggunaan dana publik. Diharapkan bahwa hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan.

Kata Kunci: Optimalisasi Anggaran, Efektivitas, Dana Publik.

Abstract

In good governance, optimizing the use of public funds is an important issue. This research aims to identify effective strategies in optimizing the use of public funds. This research uses qualitative methods with a literature study approach to analyze articles related to the use of public funds. The data source used is scientific articles relevant to the research topic via the Google Scholar website. The research results show that there are several effective strategies for optimizing the use of public funds. In addition, there is a need to increase transparency and accountability by involving the public in the financial decision-making process and publishing financial information regularly. By disseminating financial information regularly, in the budget planning process and increasing supervision by related institutions. Increased public participation can be achieved by involving the public in the planning and budgeting process, and by enabling them to provide input and suggestions on how public funds are used. This research suggests implementing these strategies in a comprehensive and sustainable manner to achieve optimal use of public funds. It is hoped that this will improve community welfare and encourage development.

Keywords: Budget Optimization, Effectiveness, Public Funds.

1. PENDAHULUAN

Anggaran digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan. Ini berfungsi sebagai motor penggerak untuk menjalankan roda pemerintahan (Labolo 2014). Menurut Government Accounting Standards Board (GASB), anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup perkiraan pengeluaran yang diusulkan serta sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam jangka waktu tertentu (Kewo and Tanor 2020). Anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat untuk melaporkan bagaimana dana publik digunakan dan bagaimana program-program yang didanai oleh negara dilaksanakan (Puspitasari, Djamruhi, and Subekti 2017). Sehingga anggaran tidak menggagalkan rencana sebelumnya, penganggaran di sektor publik harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.

Penggunaan anggaran dalam sektor publik adalah sebuah proses yang memerlukan kebijaksanaan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi (Ahmad Muksin, Talitha Zafirah Maharani, Nina Zanita Gita, Rishafa Rosicky 2024). Ketika perencanaan strategik dan perumusan strategi selesai, proses penganggaran sektor publik dimulai. Dana publik adalah sumber daya penting bagi suatu negara untuk melaksanakan berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memaksimalkan manfaat publik, dana publik harus dikelola dengan baik dan efisien (Nurkhayat, Firdaus, and Mulatsih 2018). Dalam sektor pemerintahan, anggaran publik memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah serta pengalokasian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Fauzan Effendi, Vince Ratnawati 2021). Penggunaan anggaran sektor publik dapat mencakup berbagai hal, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur dan keamanan.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dengan harapan meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dalam belanja pemerintah dan pengelolaan PNB (Wahyu Niansyah and Biswan 2018). Sementara itu, penetapan UU Nomo 4 Tahun 2018 bertujuan meningkatkan kualitas penerimaan negara (Nurkhayat et al. 2018). Kedua, mekanisme APBN benar-benar digunakan. Ketiga, UU PNB merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat. Keempat, UU PNB membantu mewujudkan optimalisasi pendapatan negara.

Dalam manajemen keuangan negara, prioritas utama adalah mengoptimalkan penggunaan dana publik (Sari 2013). Untuk mendukung fungsinya, beberapa undang-undang telah dibuat, seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa kekayaan dan sumber-sumber negara dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat 2 menetapkan cara perpajakan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 5 ayat (1) menetapkan asas untuk pengelolaan keuangan negara yang berfokus pada hasil, efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan. Pasal 13 ayat (1) mengatur penyusunan anggaran negara berdasarkan perencanaan, kebutuhan riil, dan kemampuan keuangan negara. Pasal 20 ayat (1) menetapkan prosedur untuk pelaksanaan anggaran negara.

Dengan menggabungkan kebijaksanaan, transparansi, dan akuntabilitas, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Kamarasyid 2019). Namun, dalam kenyataannya ada banyak hambatan yang menghalangi proses optimalisasi penggunaan dana publik, seperti korupsi, ketidakefektifan birokrasi, dan kurangnya akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa dana publik tidak digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan (Setiadi 2018). Akibatnya, rencana

yang kuat diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik. Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam penggunaan sumber daya publik yang terbatas (Suprianto 2014). Hal ini juga akan mencegah penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat.

Untuk optimalisasi penggunaan dana publik untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, strategi-strategi di atas harus diterapkan secara menyeluruh dan kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus suatu negara (Handy 2023). Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi penggunaan dana publik. Perencanaan anggaran dalam sektor pemerintahan berdasarkan konsep *good governance* mengutamakan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga masyarakat, sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran publik benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis artikel-artikel terkait strategi efektif optimalisasi penggunaan dana publik. Sumber data yang digunakan adalah artikel ilmiah yang relevan dengan memanfaatkan kata kunci "optimalisasi anggaran", "efektifitas dana publik" melalui website *Google Scholar*. Analisis data dilakukan dengan mengkaji penelitian terdahulu terkait topik penelitian. Kajian pustaka dalam kajian kualitatif harus digunakan secara konsisten dengan hipotesis metodologis; dengan kata lain, harus digunakan secara induktif untuk menghindari mengarahkan pertanyaan yang diminta peneliti (Sari, Harjanti, and Chooifin 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Optimalisasi Anggaran

Optimalisasi penggunaan dana publik menjadi isu krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Dana publik yang bersumber dari rakyat harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di era yang penuh dengan dinamika dan ketidakpastian, perencanaan yang matang dan terukur menjadi kunci utama dalam mencapai kesuksesan. Baik dalam skala individu, organisasi, maupun negara, perencanaan yang baik memungkinkan kita untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien.

Tabel 1. Langkah-langkah dan manfaat perencanaan yang terukur

Manfaat perencanaan	Langkah-langkah perencanaan
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peluang mencapai tujuan • Meminimalisir risiko kegagalan • Memudahkan pengambilan keputusan • Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya • Meningkatkan akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Tetapkan tujuan yang SMART. • Identifikasi sumber daya yang tersedia. • Analisis faktor internal dan eksternal. • Susun strategi dan rencana aksi. • Tetapkan indikator dan target yang terukur. • Pantau kemajuan dan lakukan penyesuaian.

Sumber: Ahmad Muksin, Talitha Zafirah Maharani, Nina Zanita Gita, Rishafa Rosicky (2024)

Tabel 1 diatas memberikan gambaran tentang langkah-langkah dan manfaat dalam melakukan perencanaan anggaran yang matang. Perencanaan matang berarti merumuskan tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dicapai. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan

berbagai faktor internal dan eksternal yang mungkin memengaruhi pencapaian tujuan. Pengukuran merupakan elemen penting dalam perencanaan. Dengan menetapkan indikator dan target yang terukur, pemerintah dapat memantau kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pengaturan prioritas anggaran sementara adalah bagian penting dari manajemen keuangan organisasi yang efektif (Handy 2023). Pemerintah harus dapat mengalokasikan sumber daya publik secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional (Prabandari 2019). Melalui pendekatan analisis kebijakan dan implementasi strategi pengelolaan dana membahas urgensi pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Strategi komunikasi efektif, transparansi, dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat menjadi poin penting untuk memastikan akuntabilitas dan kesuksesan program pembangunan. Tujuannya untuk memberikan pandangan mendalam mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Diharapkan bahwa optimalisasi penggunaan DOK tidak hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan menciptakan dampak positif jangka panjang dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3.2. Efektifitas Dana Publik

Pemanfaatan dana publik yang efektif adalah proses penyelesaian tugas dengan tepat guna dan hasil guna yang dilakukan oleh Pemerintah (Nasution, Nasution, and Alpi 2019). Efisien berarti menyelesaikan tugas dengan cara terbaik dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal, sedangkan efektif berarti mencapai tujuan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan. Ciri-ciri Pelaksanaan yang efisien dan efektif memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan yang jelas akan membantu dalam menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Membuat perencanaan yang matang perencanaan yang matang akan membantu dalam menentukan apa yang harus dilakukan, berapa banyak sumber daya yang diperlukan, dan berapa lama pekerjaan harus diselesaikan. Menggunakan sumber daya secara optimal dan harus digunakan sesuai dengan tujuan.

Efektivitas penggunaan dana publik merujuk pada kemampuan pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan dana yang tersedia secara optimal.

Tabel 2. Strategi Penggunaan Dana Publik

Indikator	Uraian
Pencapaian Tujuan	Efektivitas diukur dengan seberapa baik dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Misalnya, tujuan tersebut bisa berkisar dari penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan hingga pengembangan infrastruktur atau penciptaan lapangan kerja.
Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisiensi konteks penggunaan dana publik, ini berarti mengalokasikan dana dengan cara yang paling efisien mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi atau melakukan lelang terbuka untuk mendapatkan harga terbaik untuk proyek-proyek infrastruktur.
Pemantauan dan Evaluasi	Dengan pemantauan yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kesulitan dalam pencapaian tujuan serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Ini melibatkan penggunaan indikator kinerja yang relevan dan sistem pelaporan yang transparan.
Transparansi dan Akuntabilitas	Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang bagaimana dana tersebut digunakan dan apa hasilnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau

	penggunaan dana dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Partisipasi Masyarakat	Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penggunaan dana publik. Partisipasi masyarakat memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan masukan langsung dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan penggunaan dana, sehingga meningkatkan relevansi dan efektivitas program-program tersebut.

Sumber: Handy (2023)

Tabel 2 di atas memberikan penjelasan tentang strategi dalam pengelolaan dana. Dalam konteks penggunaan dana publik, efektivitas merupakan kunci utama untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan sumber daya yang terbatas (Handy 2023). Hal ini mengharuskan pemerintah atau lembaga publik untuk mengalokasikan dana dengan bijaksana, fokus pada pencapaian tujuan yang jelas, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Efisiensi menjadi aspek penting, di mana penggunaan teknologi dan praktik manajemen yang tepat dapat membantu memaksimalkan hasil dari setiap dolar yang diinvestasikan.

Pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus juga diperlukan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif (Ahmad Muksin, Talitha Zafirah Maharani, Nina Zanita Gita, Rishafa Rosicky 2024). Dengan sistem pemantauan yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi keberhasilan dan masalah dalam pencapaian tujuan serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan kesesuaian program-program dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penggunaan dana publik tidak hanya tentang mencapai hasil yang diukur, tetapi juga tentang memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik, dimana kebijaksanaan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip kunci yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah dan lembaga publik dalam pengelolaan sumber daya publik untuk kesejahteraan bersama.

4. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis tentang strategi efektif optimalisasi penggunaan dana publik melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan dana publik. Perencanaan yang matang membantu dalam menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Langkah-langkah tersebut diperkuat dengan adanya indikator kinerja yang terukur dan pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Strategi optimalisasi penggunaan dana publik juga memperhatikan pentingnya pengaturan prioritas anggaran dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian sumber daya publik harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta tujuan pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang efektif, transparansi, dan mekanisme monitoring yang kuat, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan kesuksesan program-program pembangunan. Terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penggunaan dana publik juga menjadi kunci dalam memastikan relevansi dan efektivitas program-program tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana publik, di mana kebijaksanaan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi prinsip-prinsip kunci. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan mendalam tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi penggunaan dana publik.

REFERENSI

- Ahmad Muksin, Talitha Zafirah Maharani, Nina Zanita Gita, Rishafa Rosicky, Winda Nurjanah. 2024. "Strategi Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Untuk Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya Publik." 03(07).
- Fauzan Effendi, Vince Ratnawati, Yesi Mutia Basri. 2021. "Penentuan Target, Strategi Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah." *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 04(02):95–116.
- Handy, V. L. 2023. "Pengaruh Strategi Pengelolaan Anggaran, Investasi Publik, Dan Manajemen Keuangan Publik Dalam Mewujudkan Bonus Demografis Di Jawa Barat." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 6(2):196–205.
- Kamarasyid, Aloii. 2019. "Peranan Kepemimpinan Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Instansi Pemerintahan Daerah." 10(2):326–53.
- Kewo, Cecilia Lelly, and Linda A. O. Tanor. 2020. "Apakah Good Government Governance Dan Pengendalian Intern Dapat Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik?" *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar* 930–31.
- Labolo, Muhadam. 2014. "Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya." *Ilmu Pemerintahan* 248.
- Nasution, Dito, Anggi Pratama Nasution, and M. Firza Alpi. 2019. "Pengaruh Penerapan Smart ASN Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Di Era Disrupsi Teknologi Indonesia 4.0." *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi* 43–51.
- Nurkhayat, Ahmad, Muhammad Firdaus, and Sri Mulatsih. 2018. "Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 10(1):35–47. doi: 10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22705.
- Prabandari, Luh Md. Adinda Sukma. 2019. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung."
- Puspitasari, Devy Sylvia, Ali Djamruhi, and Imam Subekti. 2017. "Anggaran Partisipatif, Senjangan Anggaran, Kinerja Aparatur Pemerintah Dan Tata Kelola Pemerintahan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 3(1):70–76. doi: 10.21776/ub.jiap.2017.003.01.9.
- Sari, Anita Kartika, Wulandari Harjanti, and Mochamad Choiifin. 2021. *Metodologi Penelitian*.
- Sari, Diana. 2013. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah & Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Indonesian Journal Of Economics And Business IJEB* (September 2013):43.
- Setiadi, Wicipto. 2018. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Gender and Development* 120(1):0–22.
- Suprianto, Edy. 2014. "Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 15(1):17. doi: 10.30659/ekobis.15.1.17-30.
- Wahyu Niansyah, Fitri Irka, and Ali Tafriji Biswan. 2018. "Analisis Varians Anggaran Belanja Untuk Pengukuran Kinerja (Studi Terapan Pada KPP Badan Dan Orang Asing)." *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 3(4):348–63.